



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

**PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 26 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS UNTUK DAERAH
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
TAHUN 2011**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 20 ayat (1) tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Gubernur dapat menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tertentu sesuai Harga Pasaran Umum (HPU) setempat khusus untuk daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Khusus untuk Daerah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Tahun 2011.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4238);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

14. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H. M. SOERYA RESPATIONO, SH. MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2009 tentang Pemberitahuan Pabean dalam rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 316);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS UNTUK DAERAH KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS TAHUN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan melekat secara permanen.
5. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
6. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
8. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
9. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
10. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
11. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
12. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

BAB II PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor Khusus untuk Daerah Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU Khusus untuk Daerah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1 (satu); dan
 - b. mobil barang/beban sebesar 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 3

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan pada kolom 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan pada kolom 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 5

- (1) Penghitungan Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar khusus untuk Daerah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU khusus untuk Daerah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 6

NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor:
 - a. jenis, merek dan tipe yang belum disebutkan dalam Lampiran dan tambahan Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan:

- 1) untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the road*) atau 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) di bawah perkiraan harga isi (*on the road*).
 - 2) untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- b. jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan:
- 1) untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya.
 - 2) untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di Daerah masing-masing.
- (2) Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB III TARIF PAJAK

Pasal 8

- (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor umum; dan
 - c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Tarif Bea Balik Nama kendaraan Bermotor atas penyerahan Pertama ditetapkan sebesar:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum; dan
 - c. 3% (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
- (3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan Kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar:
 - a. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor umum; dan
 - c. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (4) Tarif Bea Balik Nama kendaraan bermotor atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar:
 - a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bukan umum;
 - b. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan umum; dan
 - c. 0,03% (nol koma nol tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pajak harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas bulan).

- (2) Pembayaran BBN-KB dilakukan pada saat pendaftaran/registrasi dan/atau bergantinya kepemilikan kendaraan Bermotor.
- (3) PKB dan BBN-KB diunasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SKPD.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI DAN KERINGANAN

Pasal 10

Wajib Pajak yang karena kelalaian ataupun kealpaannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan sanksi administrasi berupa denda 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak terhutang, ditambah sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) untuk keterlambatan bulan berikutnya, maksimal 71% (tujuh puluh satu persen).

Pasal 11

Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan PKB dan BBN-KB

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 Juni 2011

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Muhammad Sani
MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

Suhajar Diantoro

SUHAJAR DIANTORO

NO	MEREK	JENIS	MODEL	TAHUN	NRKB	
1	BMW		X1 3.0 A/T	2011	Rp. 310,000,000	
2			X1 Drive 3.0 Executive	2011	Rp. 470,000,000	
3			X6 3.0 A/T	2011	Rp. 535,000,000	
4			X6 Drive 3.0 Executive	2011	Rp. 680,000,000	
5	CHEVROLET	SEDAN	AVEO 1.4 M/T	2011	Rp. 63,000,000	
6			AVEO 1.4 M/T S	2011	Rp. 87,000,000	
7			AVEO 1.4 A/T	2011	Rp. 70,000,000	
8			AVEO 1.4 A/T G	2011	Rp. 95,000,000	
9		PENUMPANG	AVEO 1.4 A/T	2011	Rp. 66,000,000	
10			AVEOS 1.4 A/T S	2011	Rp. 85,000,000	
11				CAPTIVA 2.4 A/T	2011	Rp. 165,000,000
12				CAPTIVA 2.4 A/T 4WD	2011	Rp. 225,000,000
13	SEDAN	CRUZE 1.6 A/T	2011	Rp. 110,000,000		
14		CRUZE 1.6 A/T GT	2011	Rp. 150,000,000		
15		CRUZE 1.8 A/T	2011	Rp. 160,000,000		
16		CRUZE 1.8 A/T GT	2011	Rp. 180,000,000		
17	CHERY	SEDAN	A5 1.6 M/T	2011	Rp. 32,500,000	
18			A5 2.0 A/T	2011	Rp. 33,500,000	
19		PENUMPANG	B1 1.1 M/T	2011	Rp. 30,000,000	
20			B1 1.1 A/T	2011	Rp. 31,000,000	
21			B2 2.0 A/T	2011	Rp. 58,000,000	
22			B3 1.6 M/T	2011	Rp. 45,000,000	
23	HONDA	SEDAN	CIVIC 1.8 A/T	2011	Rp. 148,000,000	
24			PENUMPANG	CR-2 1.5 A/T	2011	Rp. 127,000,000
25		CR-2 1.5 A/T BETHA		2011	Rp. 140,000,000	
26		CR-2 1.5 A/T ALPHA		2011	Rp. 160,000,000	
27				FIT 4X2 A/T	2011	Rp. 62,000,000
28			FIT 1.3 A/T X	2011	Rp. 75,000,000	
29			FIT 1.3 A/T L	2011	Rp. 91,000,000	
30			FIT 1.3 A/T G	2011	Rp. 95,000,000	
31			FIT 1.3 A/T RS	2011	Rp. 110,000,000	
32		JEEP	PENUMPANG 4X4	WRANGLER 3.0	2011	Rp. 205,000,000
33				WRANGLER 3.8 4DK	2011	Rp. 220,000,000
34	WRANGLER 3.8 A/T RUBICON 2 DOOR			2011	Rp. 285,000,000	
35	WRANGLER 3.8 A/T RUBICON 4 DOOR			2011	Rp. 320,000,000	
36	LEXUS		RX270 A/T	2011	Rp. 330,000,000	
37			RX270 A/T Version S	2011	Rp. 350,000,000	
38			RX270 A/T Version S 4WD	2011	Rp. 410,000,000	
39			RX270 A/T Version L	2011	Rp. 440,000,000	
40			RX350 A/T Version S	2011	Rp. 380,000,000	
41			RX350 A/T Version S 4WD	2011	Rp. 420,000,000	
42			RX350 A/T Version L	2011	Rp. 470,000,000	
43		HUMMER		H3	2011	Rp. 450,000,000
44	MAZDA	SEDAN	RX 8 A/T	2011	Rp. 190,000,000	
45			ROADSTER 2.0 A/T	2011	Rp. 200,000,000	
46			ROADSTER 2.0 A/T 3S	2011	Rp. 210,000,000	
47			ROADSTER 2.0 A/T VS	2011	Rp. 250,000,000	
48	MERCEDES BENZ		E 200 A/T	2011	Rp. 310,000,000	
49			E 200 A/T KOMPRESSOR	2011	Rp. 320,000,000	
50			E 200 A/T AVANTGARDE	2011	Rp. 330,000,000	
51			E 250 A/T	2011	Rp. 330,000,000	
52			E 250 A/T AMG	2011	Rp. 410,000,000	
53			E 250 A/T AMG CABRIOLET	2011	Rp. 550,000,000	
54			E 350 A/T	2011	Rp. 700,000,000	
55		MITSUBISHI		LANCER 2.0 A/T	2011	Rp. 140,000,000
56			LANCER 2.0 GT A/T	2011	Rp. 160,000,000	
57			PACERO 3.0 A/T	2011	Rp. 350,000,000	
58			PACERO EXCEED 3.0	2011	Rp. 470,000,000	
59			PACERO EXCEED 3.0 V6	2011	Rp. 575,000,000	
60	NISSAN	SEDAN	FAIRLADY 3.0 A/T	2011	Rp. 320,000,000	
61			PENUMPANG	MARCH 1.2 A/T	2011	Rp. 75,000,000

NO	MERK	JENIS	MODEL	TAKUN	NJKB
52			MARCH 1.2 A/T X	2011	Rp. 65,000,000
53			MARCH 1.2 A/T S	2011	Rp. 80,000,000
54			MARCH 1.2 A/T X FOUR	2011	Rp. 102,000,000
55			MARCH 1.2 A/T S FOUR	2011	Rp. 112,000,000
56			MURANO 2.5 A/T	2011	Rp. 290,000,000
57			MURANO 2.5 V6 A/T	2011	Rp. 348,000,000
58	PONCHE	SEDAN	BOXSTER A/T	2011	Rp. 420,000,000
59			BOXSTER A/T TIPTRONIC	2011	Rp. 520,000,000
70			BOXSTER A/T TIPTRONIC CARBONLET	2011	Rp. 705,000,000
71			CAYENNE 3.6 A/T	2011	Rp. 550,000,000
72			CAYENNE 3.6 A/T TIPTRONIC	2011	Rp. 680,000,000
73	SUHARU		EXIGA 2.0GT AWD 5A/T	2011	Rp. 200,640,000
74			EXIGA 2.0i AWD 4A/T	2011	Rp. 182,000,000
75			FORESTER 2.0X AWD 4A/T	2011	Rp. 174,000,000
76			FORESTER 2.5X AWD 4A/T	2011	Rp. 215,000,000
77			OUTBACK 2.5i AWD CVT (4X4) A/T	2011	Rp. 229,000,000
78			OUTBACK 3.6R AWD 5A/T	2011	Rp. 315,000,000
79			LEGACY 2.5GT AWD 5A/T	2011	Rp. 224,000,000
80			LEGACY 2.0i AWD CVT	2011	Rp. 187,000,000
81			TRIBECA 3.6 AWD 5A/T	2011	Rp. 400,000,000
82			IMPREZA 5i 2.5R AWD 4A/T	2011	Rp. 135,000,000
83			IMPREZA 4i 2.0R-S AWD 4A/T	2011	Rp. 142,000,000
84			IMPREZA 5i 2.0R-S AWD 4A/T	2011	Rp. 148,500,000
85			IMPREZA 4i 2.5WRX-S 5M/T	2011	Rp. 187,000,000
86			IMPREZA WRX STI A-LINE	2011	Rp. 280,000,000
87			IMPREZA WRX STI Spec - C	2011	Rp. 280,000,000
88			IMPREZA 2.5 WRX STI 6MT	2011	Rp. 275,000,000
89			IMPREZA WRX 2.5 5M/T	2011	Rp. 200,000,000
90	TOYOTA		ACE 2WD	2011	Rp. 92,000,000
91			AMIE 4WD	2011	Rp. 135,000,000
92			BELTA 1.8 A/T	2011	Rp. 65,000,000
93			BELTA 1.8 A/T G	2011	Rp. 78,000,000
94			VIOS 1.5 A/T	2011	Rp. 99,000,000
95			ALPHARD 2.4 3WD A/T	2011	Rp. 320,000,000
96			ALPHARD 2.4 A/T X	2011	Rp. 335,000,000
97			ALPHARD 2.4 A/T S	2011	Rp. 380,000,000
98			ALPHARD 2.4 A/T S PREMIUM SELECTION II	2011	Rp. 486,000,000
99			ALPHARD 2.4 A/T G	2011	Rp. 575,000,000
100			VELFIRE 2.5V A/T	2011	Rp. 310,000,000
101			VELFIRE 2.4 A/T X	2011	Rp. 335,000,000
102			VELFIRE 2.4 A/T S	2011	Rp. 360,000,000
103			VELFIRE 2.4 A/T S PREMIUM SELECTION II	2011	Rp. 486,000,000
104			VELFIRE 2.4 A/T G	2011	Rp. 520,000,000
105			HARRIER 2.4 A/T	2011	Rp. 300,000,000
106			HARRIER 2.4 A/T S	2011	Rp. 330,000,000
107			HARRIER 2.4 A/T S PANORAMIC	2011	Rp. 345,000,000
108			HARRIER 2.4 A/T S-L PACKAGE	2011	Rp. 365,000,000
109			HARRIER 2.4 A/T PREMIUM L-ENHANCE	2011	Rp. 473,000,000
110			LAND CRUISER PRADO 2.7 A/T	2011	Rp. 350,000,000
111			LAND CRUISER PRADO 2.7 A/T IX	2011	Rp. 380,000,000
112			LAND CRUISER PRADO 2.7 A/T IX L-PACKAGE	2011	Rp. 430,000,000
113			LAND CRUISER PRADO 4.0 A/T	2011	Rp. 410,000,000
114			LAND CRUISER PRADO 4.0 A/T IX	2011	Rp. 450,000,000
115			LAND CRUISER PRADO 4.0 A/T IX L-PACKAGE	2011	Rp. 470,000,000
116			LAND CRUISER 300 4.6 A/T	2011	Rp. 450,000,000
117			LAND CRUISER 300 4.6 A/T AX	2011	Rp. 490,000,000
118			LAND CRUISER 300 4.6 A/T AX G	2011	Rp. 605,000,000
119			LAND CRUISER 300 4.6 A/T SX	2011	Rp. 720,000,000
120			LAND CRUISER 300 4.2 DIESEL A/T	2011	Rp. 560,000,000
121			RAV 4 A/T	2011	Rp. 165,000,000
122			RAV 4 2.4 A/T G	2011	Rp. 238,000,000
123			RAV 4 2.4 A/T 4WD	2011	Rp. 265,000,000
124			WISH 1.8 A/T	2011	Rp. 140,000,000
125			WISH 1.8 A/T X	2011	Rp. 190,000,000
126			WISH 1.8 A/T S	2011	Rp. 205,000,000
127			WISH 1.8 A/T S 4WD	2011	Rp. 250,000,000
128			COMMUTER 2.5 A/T	2011	Rp. 230,000,000
129			COMMUTER 2.5 A/T	2011	Rp. 290,000,000
130			VITZ 1.3 A/T	2011	Rp. 65,000,000
131			VITZ 1.5 G A/T	2011	Rp. 72,450,000
132			NOAH 2.0G A/T	2011	Rp. 155,000,000
133			NOAH 2.0G A/T	2011	Rp. 175,000,000

NO	MERK	JENIS	MODEL	TAHUN	NJKB
134	VOLKSWAGEN		NEW BIGNAN 1.0 A/T	2011	Rp. 362,000,000
135			TIGUAN 2.0 A/T	2009	Rp. 286,770,000
136			TOUAREG 3.0 TDI A/T	2011	Rp. 447,700,000
137			POLO 1.4 A/T	2011	Rp. 90,750,000
138			CARAVELLE 2.0 TDI A/T	2011	Rp. 363,000,000
139	AUDI		A6 2.0 TFSI A/T	2011	Rp. 249,260,000
140			A6 2.8 FSI A/T	2011	Rp. 296,450,000
141			A6 3.0 TFSI A/T	2011	Rp. 332,750,000
142			Q5 2.0 TFSI A/T	2011	Rp. 308,550,000
143			Q7 3.0 TFSI A/T	2011	Rp. 462,220,000

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU



MUHAMMAD SANI